BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di lndonesia literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintahan dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi keungan ini diharapkan masyarakat lebih berpengetahuan, berkemampuan dan memiliki keterampilan dalam mengelola dan membuat keputusan keuangan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kestabilan sistem keuangan dan dapat mengurangi kerentanan pada sistem keuangan di Indonesia.

Literasi keuangan telah diakui secara luas sebagai *essential life skill* yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat. Setiap orang harus memiliki literasi keuangan yang cukup untuk mengelola penerimaan dan pengeluarannya, memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta memupuk tabungan atau investasi untuk mempersiapkan masa mendatang. Seluruh masyarakat wajib memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan mengambil keputusan keuangan untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Salah satu elemen penting dari literasi adalah literasi ekonomi atau literasi keuangan. Robert F. Duval, President dari *the National Council on Economic Education, USA,* menyebutkan bahwa *: Economic litercy is a vital skill, just as vital as reading literacy"* (Duval 1998). Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi berpotensi memberikan nilai produktivitas yang lebih tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, banyak negara yang menempatkan literasi keuangan sebagai salah satu program prioritas walaupun menggunakan berbagai istilah dalam strategi nasionalnya.

Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe, 1998). Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap mengelola keuangan (Remund, 2010).Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan istilah literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan *(knowledge),* keyakinan *(confidebmmnce),* dan keterampilan *(skill)* konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (OJK,2013a). Definisi ini mengalami penyempurnaan dalam Peraturan OJK No. 76 tahun 2016 dan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan menambah aspek sikap dan perilaku keuangan di samping pengetahuan,

keterampilan dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan keuangan. Pengertian literasi keuangan tersebut menjadi pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (POJK, 2016)

Definisi seperti ini, dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, namun juga perlu ada perubahan sikap keuangan *(financial attitude)* dan perilaku keuangan *(financial behavior)* guna mencapai kesejahteraan secara keuangan. Aspek sikap dan perilaku ini penting karena sikap dan perilaku keuangan yang mendorong seseorang untuk menentukan tujuan keuangan, memiliki perencanaan keuangan untuk menentukan tujuan keuangan, memiliki perencanaan keuangan, mengambil keputusan keuangan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik.

Menurut Wibowo (2014) salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan survei nasional literasi keuangan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* yaitu hanya sebesar 21,8 %, *sufficient literate* sebesar 75,69%, *less literate* sebesar 2,06% dan *not literate* sebesar 0,14%, dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi) sebesar 59,7%.

Tabel 1.1

Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia, 2013

No	Indeks Literasi Keuangan	%
1.	Well Literate	21,84
2.	Sufficent Literate	75,69
3.	Less Literate	2,0
4.	Not Literate	0,41
	100	

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2013

Berdasarkan angka indeks tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia dalam hal literasi keuangan masih rendah, dan kurang dari separuh penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini pemerintah perlu berupaya untuk memupuk dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat mulai dari usia dini hingga dewasa, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melalui pendidikan keuangan (*financial Education).*

Pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan bagi setiap individu agar dapat mengelola dan merencanakan keuangannya. Begitu pula pelaku usaha

khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan sebagai penopang perekonomian negara yang tidak bisa di kesampingkan begitu saja, hal ini dikarenakan UMKM nemiliki daya tahan yang cukup tinggi. Pelaku UMKM wajib mengerti tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan (literasi keuangan) sehingga kelak dapat bermanfaat dalam proses pengembangan usahanya, oleh karena itu literasi keuangan sudah menjadi hal mutlak yang harus dipahami oleh pelaku UMKM (Cahyono, 2012).

Survei nasional literasi keuangan tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat literasi UMKM yang, dimana pengusaha mikro mempunyai tingkat literasi yang paling rendah, yaitu 23,8%. Selain tingkat literasi keuangan yang masih rendah, UMKM juga memiliki tingkat pengunaan produk dan layanan keuangan, khususnya pembiayaan yang rendah.Akses pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis UMKM sering dianggap sebagai hambatan utama dalam pegembangan kewirausahaan dan usaha kecil, baik dari segi ketersediaan sumber pembiayaan eksternal, tetapi juga syarat dan kondisi pembiayaan tersebut (suku bunga, biaya, jaminan yang diperlukan).Salah satu dari pembiayaan UMKM adalah sebagian besar dari mereka tidak menyadari atau kurang terinformasi tentang kemungkinan untuk membiayai diri mereka sendiri melalui pembiayaan lembaga keuangan.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2011 terdapat 52 juta UMKM yang 60% dari totalnya melibatkan pekerjaan perempuan. UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat membantu dalam ketahanan perekonomian negara, hal ini dikarenakan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.Akan tetapi, literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM khususnya perempuan masih terbilang rendah. Hal ini perlu perhatian khusus agar para pelaku perempuan dalam skala UMKM dapat juga meningkatkan kecerdasannya akan perencanaan keuangan dan dapat menikmati layanan jasa perbankan sesuai kebutuhan mereka. Layanan perbankan yang dapat membantu para pengusaha UMKM antara lain: pemberian kredit untuk modal kerja dan juga layanan perbankan lainnya (Purnomo, 2011).

Laporan Bank Indonesia (2012) menunjukkan bahwa kesetaraan gender penting dalam proses peningkatan literasi keuangan. Dampak pemberdayaan perempuan dalam ekonomi sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi karena hal ini merupakan cara yang cerdas secara ekonomi. Jika perempuan dapat diberdayakan secara ekonomi, ini akanmembantu pengentasan kemiskinan. Di Indonesia kontribusi perempuan sebagai pengusaha khususnya pengusaha UMKM sudah cukup lama berkembang, dimana dapat dilihat dari jumlah pengusaha UMKM perempuan di Indonesia pada tahun 2012 totalnya mencapai 60% dari total pengusaha UMKM, seperti itu dibuktikan pada data berikut:

Tabel 1.2
Data Pengusaha UMKM

Jumlah Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia	**60% dari total pengusaha UMKM**
Kategori Usaha	- 85% Usaha Mikro - 13% Usaha Menengah - 2% Usaha Besar

Sumber: IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), 2012

Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM perempuan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang mana jumlahnya telah mencapai 60% dari jumlah UMKM secara keseluruhan. Dalam kategori usaha UMKM perempuan terdiri dari 85% usaha mikro, 13% usaha menengah, dan 2% usaha besar.Dengan melihat perkembangan UMKM perempuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah untuk lebih melirik, membina serta mendukung para pengusaha perempuan terutama dalam skala UMKM agar eksistensinya tetap diakui dan lebih meningkat.

Pengusaha perempuan di Indonesia perlu mendapat dukungan modal dari perbankan untuk dapat membesarkan usaha dan membantu kelancaran usahanya. Kemampuan wirausaha perempuan tidak kalah dari laki-laki. Menurut *International Finance Corporation* (IFC), hal ini sebagai potensi bagi perbankan dan menjadikannya target pemasaran produk pembiayaan. Berdasarkan data dari IFC, perempuan memiliki potensi untuk menghasilkan hubungan perbankan yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Kementerian Koperasi dan UKM (2012) mengatakan bahwa perhatian kepada pengusaha perempuan juga ditunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layananannya bagi nasabah perempuan. Perempuan merupakan pasar yang sangat potensial bagi bank komersial, mengingat masih banyak di antaranya yang belum terlayani oleh akses perbankan. Pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM pengusaha perempuan dengan melakukan pemberian kredit untuk memperluas usaha.

Peran pemilik UMKM sangatlah dominan dalam menjalankan usahanya.Pemilik usaha mempunyai tanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya.Keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan sepenuhnya berada ditangan pemilik.Jadi, seorang pemilik harus mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perusahaannya dengan mengambil keputusan yang tepat.Pengetahuan keuangan dan sikap keuangan yang baik dapat membantu para pemilik usaha dalam mengambil keputusan-keputusan

yang tepat dalam manajemen keuangan usahanya, sehingga menghasilkan perilaku manajemen yang baik.

Terdapat beberapa masalah pada UMKM yang menjadi perhatian, diantaranya berkaitan dengan perilaku manajemen keuangan yaitu permasalahan pengetahuan keuangan yang dimilki. Pengetahuan keuangan terdiri dari keterampilan keuangan dan penguasaan alat keuangan. Ida dan Dwinta (2010) menjelaskan keterampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam perilaku manajemen keuangan, seperti menyiapkan sebuah anggaran, memilih rencana asuransi, dan menggunakan kredit adalah contoh dari keterampilan keuangan. Sedangkan alat keuangan adalah sarana yang digunakan dalam pembuatan keputusan manajamen seperti cek, kartu kredit, dan kartu debit.

Permasalahan dalam hal keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya, terbukti berdasarkan survey yang dilakukan Raharjo dan Wirjano (2012), kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah membuat pembukuan apapun terkait manajemen usahanya, seharusnya pelaku UMKM membuat pembukuan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dalam keuangannya. Namun fakta yang ditemukan adalah kesadaran pelaku UMKM untuk membuat pembukuan untuk manajemen keuangan usahanya masih rendah. Penyebab rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membuat perencanaan anggaran dikarenakan oleh pemikiran pelaku UMKM bahwa perencanaan anggaran tidak penting dan dapat diatur dengan mudah dan tidak ada dampak buruk bagi keberlangsungan usaha mereka meskipun pelaku UMKM tidak melakukan perencanaan anggaran.

Permasalahan keterampilan keuangan yang selanjutnya adalah dalam hal investasi. Tidak banyak pelaku UMKM yang terjun ke dunia investasi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penyebab rendahnya minat pelaku UMKM untuk berinvestasi dikarenakan para peaku UMKM tidak cukup paham dan bahkan sama sekali tidak tahu mengenai apa itu investasi. Sehingga para pelaku UMKM memilih tidak berinvestasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan pelaku UMKM tentang investasi masih sangat rendah.

Permasalahan keterampilan keuangan tidak hanya dalam hal anggaran dan investasi saja, dalam hal kredit juga para pelaku UMKM mengalami kendala. Pengetahuan mengenai kredit para pelaku UMKM masih sangat rendah. Pelaku UMKM tidak begitu paham faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, sehingga sulit bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan berbagai pertimbangan saat mengajukan kredit, seperti pertimbangan tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Seharusnya para pelaku UMKM mampu mempertimbangan berbagai hal pada saat akan mengajukan kredit agar dapat menggunakan kredit secara bijaksana.

Secara umum, kurangnya pengetahuan keuangan dalam hal keterampilan keuangan diatas diakibatkan oleh pendidikan. Pengetahuan keuangan dapat diperoleh dari pendidikan formal dan sumber-sumber informal. Pendidikan formal ini seperti program sekolah tinggi atau kuliah, seminar, dan kelas pelatihan di luar sekolah. Sedangkan sumber-umber informal dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti dari orang tua, teman, dan rekan kerja, maupun yang berasal dari pengalaman sendiri. Pinasti (2007) menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi keberlangsungan usaha. Apabila pelaku UMKM memiliki pengetahuan akuntansi yang baik, sudah pasti pelaku UMKM memiliki keterampilan keuanganyang baik pula. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan pengetahuan keuangan para pelaku UMKM sangat buruk.

Terdapat masalah lain yang mempengaruhi perilaku manajamen keuangan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, yaitu masalah mengenai sikap keuangan yang dimiliki. Kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki sikap yang buruk mengenai keuangan, ditandai dengan rendahnya motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan usahanya, padahal motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam manajamen keuangan sangat penting. Buruknya sikap keuangan yang dimiliki para pelaku UMKM juga ditandai dengan pemikiran yang mudah merasa puas dengan kinerja yang ada dan belum berfikir untuk melakukan peningkatan kemampuan dibidang manajemen keuangan karena sebagian pelaku usaha merasa kinerjanya sudah cukup baik dan usahanya tetap berjalan dengan lancar dan tanpa kendala meskipun pelaku UMKM tidak membuat perencanaan anggaran dan pengendalian terhadap keuangan. Sikap tersebut apabila dibiarkan akan membuat kinerja UMKM menurun dan tidak mampu bersaing secara kompetitif di pasar. Seperti yang diungkapkan (Kiryanto, dkk. 2001) bahwa seorang pelaku usaha memerlukan motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola keuangan.

Para pengguna akuntansi khususnya dalam hal ini pelaku UMKM sudah seharusnya lebih memerhatikan manajemen keuangan pada usaha yang dijalankannya mengingat manfaat dari pengetahuan keuangan dan sikap keuangan yang begitu besar bagi keberlangsungan usahanya. Selain itu, menyiapkan anggaran dapat menjadi modal dasar bagi UMKM untuk pengembalian keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, pengembangan harga, dan dalam hubungannya dengan dan kreditur. Menyiapkan anggaran juga dapat digunakan dalam rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses prduksi.

Berbagai permasalahan yang dialami para pelaku UMKM mencerminkan buruknya pengetahuan keuangan dan sikap keuangan yang dimiliki para pelaku UMKM yang nantinya akan mempengaruhi perilaku manajamen keuangan yang dimiliki. Banyak upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya perilaku manajemen keuangan. Salah satu penelitian yang mengungkapkan factor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mien dan Thao (2015) yang berjudul *Factors Affecting Personal Financial Management Behaviors: Evidence from Vietnam.* Penelitian ini menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan pada generasi muda usia 19-30 tahun antara lain sikap keuangan, pengetahuan keuangan, dan *locus of control.*

Di Indonesia sendiri telah terdapat penelitian serupa salah satunya oleh Ida dan Dwinta (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa factor yang berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan seperti *locus of control,* pengetahuan keuangan, dan pendapatan.Kemudian Tarry Novita Maharani (2016) juga melakukan penelitian serupa dan mengungkapkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan yaitu literasi keuangan pribadi dan sikap keuangan.

Terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen keuangan.Salah satunya adalah pengetahuan keuangan.Kholilah dan Iramani (2013) mendeskripsikan pengetahuan keuangan sebagai sikap penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan (alat keuangan dan keterampilan keuangan).Keterampilan keuangan adalah sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam manajamen keuangan.Seperti menyusun angaran, memilih investasi, memilih rencana asuransi, dan sikap dalam menggunakan kredit, sedangkan alat keuangan adalah alat yang digunakan dalam pembuatan keputusan keuangan, seperti cek, kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Individu dengan pengetahuan keuangan yang memadai akan memiliki perilaku manajemen keuangan yang lebih baik, seperti membayar tagihan tepat waktu, melakukan pembukuan terhadap pengeluaran yang dilakukan setiap bulan, dan memiliki cadangan dana untuk kondisi darurat (Yulianti dan Silvy, 2013).

Menurut Sina (2014), memahami aspek kepribadian dalam mengelola keuangan dibutuhkan untuk sukses mengelola keuangan karena sikap tipe kepribadian berbeda dalam cara mengelola keuangannya. Setelah dilakukan analisis mendalam, ditemukan beberapa kelemahan dari masing-masing tipe kepribadian yang akan menyebabkan masalah keuangan seperti salah satunya adalah utang yang berlebihan. Lown (2008) dalam Sina (2014) menemukan bahwa terjadi perbedaan kepribadian antara perempuan terkait tabungan pensiun dan juga toleransi risiko.Hal ini menyebabkan perilaku keuangan pun menjadi berbeda sehingga secara keselurahan hasil penelitian menemukan bahwa perempuan membutuhkan

pendidikan tentang risiko, dampak dari waktu terhadap nilai uang dan yang signifikan yaitu membutuhkan pembuatan tujuan keuangan yang benar.Mengacu padatemuan temuan sebelumnya, dipahami bahwa tingkat literasi keuangan dapat ditinjau dari pengetahuan keuangan, sikap keuangan, keterampilan keuangan, perilaku keuangan dan kinerja keuangan.

Pemilihan wilayah pada penelitian ini yaitu Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.Jumlah penduduk Kecamatan Patrang adalah sebanyak 104.185 orang, terdiri 52.033 penduduk laki-laki dan 52.152 penduduk perempuan, sedangkan jumlah keluarga sebanyak 27.193, dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 104.185 orang dengan rata-rata anggota sebanyak 3 – 4 orang. Ratio jenis kelamin penduduk Kecamatan Patrang adalah 99,70% artinya dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 99,70% orang penduduk laki-laki. Berikut ini data jumlah penduduk Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yaitu:

Table 1.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Patrang

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	**Perempuan**		
1	Gebang	15.855	13.507	29.362	117,36
2	Jember Lor	8.971	10.041	19.012	89,34
3	Patrang	9.040	8.930	17.970	101,23
4	Baratan	4.995	5.183	10.178	96,37
5	Bintoro	5.699	7.012	12.711	81,27
6	Slawu	3.855	3.777	7.632	102,06
7	Jumerto	1.442	1.460	2.902	98,97
8	Banjarsengon	2.176	2.242	4.418	97,06
	Jumlah Total	**52.033**	**52.152**	**104.185**	**99,70**

Sumber : Data Profil Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, 2017.

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah penduduk secara berututan dari yang terbesar adalah Kelurahan Gebang 29.362 orang, Kelurahan Jember Lor 19.012 orang, Kelurahan Patrang 17.970 orang, Kelurahan Baratan 10.178, Kelurahan Bintoro 12.711 orang, Kelurahan Slawu 7.632 orang, Kelurahan Jumerto 2.902 orang, Kelurahan Banjarsengon 2.176 orang. Dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sebagian masyarakat Kecamatan Patrang dari segi ekonomi mempunyai kemampuan meningkatkan taraf hidupnya dengan berbagai usaha, baik usaha berskala kecil, menengah, atau besar. Berbagai usaha tersebut dapat membantu menghidupkan perputaran roda ekonomi masyarakat Kecamatan Patrang, sehingga

mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Patrang dan tidak tertinggal oleh daerah-daerah lain. Berikut ini data berbagai jenis usaha yang ada di Kecamatan Patrang dapat dilihat sebagai berikut:

Table1.4
Jenis Usaha di Kecamatan Patrang

No	Kelurahan	Pasar Kel.	Toko Modern	Toko Pra Cangan	Kope-rasi	Usaha Kecil	Lain-Lain
1	Gebang	2	16	425	10	92	35
2	Jember Lor	2	9	253	11	67	5
3	Patrang	2	6	380	8	45	12
4	Baratan	1	8	205	3	42	9
5	Bintoro	0	7	211	2	43	22
6	Slawu	0	2	252	4	125	54
7	Jumerto	0	2	142	2	87	32
8	Banjarsengon	0	2	105	2	56	27
	Jumlah Total	**7**	**54**	**1973**	**42**	**557**	**196**

Sumber : Data Profil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, 2017.

Alasan dilakukan di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, karena menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro banyaknya jumlah wirausaha di daerah tersebut tinggi dibandingkan di kecamatan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Unit Usaha

Tahun	**Jumlah Unit Usaha**	
	Laki-laki	Perempuan
2013	58	52
2014	62	53
2015	61	54
2016	56	43
2017	68	51
Total	305	252
	557	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kecamatan Patrang dari tahun 2013-2017 mencapai 557 unit usaha.Jumlah pelaku UMKM perempuan di Kecamatan Patrang jumlahnya dari tahun 2013-2017 mencapai 252 unit, untuk jumlah pelaku UMKM laki-laki dari tahun 2013-2017 mencapai 305 unit usaha. Jadi jumlah pelaku UMKM perempuan di Kecamatan Patrang lebih rendah dibandingkanjumlah pelaku UMKM laki-laki.

Objek penelitian ini adalah pelaku ekonomi UMKM perempuan di Kecamatan Patrang, denganmelihat kondisi UMKM perempuan diKecamatan Patrang saat ini masih memiliki keterbatasan dengan berbagaipermasalahan.Pada dasarnya secara umum terletak keterbatasan SDM dari pelaku UMKM itu sendiri. Keterbatasan yang dialami tersebut diantaranya dalam permodalan, kurangnya pengetahuandalam manajemen keuangan*(financial knowledge)*, kurangnya keterampilan mengelola keuangan*(financial skill))*, rendahnya dalam menyikapi keuangan *(financial attitude)* dan perilaku keuangan *(financial behavior)*, terbatasnya akses informasi dan teknologi, serta sempitnya lingkup pasaryang masih merupakan faktor pembatas ruang gerak UMKM.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji tentang literasi keuangan pada perempuan karenamemiliki keterbatasan dengan berbagaipermasalahan yang telah diuraikan diatas, hal tersebut masih merupakan faktor pembatas ruang gerak UMKM perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan *(knowledge)*, keyakinan *(confidence)*, dan keterampilan *(skill)* konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Kementerian Koperasi dan UKM (2012) mengatakan bahwa perhatian kepada pengusaha perempuan juga ditunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layananannya bagi nasabah perempuan. Perempuan merupakan pasar yang sangat potensial bagi bank komersial, megingat masih banyak di antaranya yang belum terlayani oleh akses perbankan. Pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM bagi para pengusaha perempuan dengan melakukan pemberian kredit untuk memperluas usaha.

Mengingat masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Perempuan di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terutama pada SDM dan pengelolaan keuangan maka akan dilakukan analisis mengenai tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.Dengan mengacu pada permasalahan yang dikemukakan diatas, maka muncul pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana tingkat literasi keuangan pada pelaku ekonomi UMKM perempuan di Kecamatan Patrang, Kabupaten

Jemberberdasarkan *financial knowledge, financial behavior, financial skill, financial attitude,* dan kinerja keuangan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, mengenai tingkat literasi keuangan pada pelaku ekonomi UMKM perempuan di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yaitu untuk mendeskripsikan tingkat literasi keuangan pelaku ekonomi UMKM perempuan di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan *financial knowledge, financial behavior, financial skill, financial attitude,* dan kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian dan saran dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam meningkatkan potensi maupun eksistensi para pelaku UMKM khususnya pelaku usaha perempuan
2. Bagi Masyarakat : Penelitian ini bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM perempuan dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman akan literasi keuangan atau melek financial.
3. Bagi Mahasiswa : Penelitian ini dapat dijadikan sebagi referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya.